

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar Tandjung, Sambutan Menteri Negara Perumahan Rakyat, Mandar Maju, Bandung, 1997
- Aldrige M. Trevor, Komentar Atas Undang-Undang Rumah Susun, Mandar Maju, Bandung, 1997
- A.P, Parlindungan, Komentar Atas Undang-Undang Pemukiman dan Undang-Undang Rumah Susun, Mandar Maju, Bandung, 1997
- Djemabut Blaang, Perumahan dan Pemukiman Sebagai Kebutuhan Pokok, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1986
- Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta, 1983
- Komar Andassasmita, Hukum Apartemen / Rumah Susun, Ikatan Notaris Indonesia, Komisariat Daerah Jawa Barat, Cetakan II, Jakarta, 1986
- Kusumadi Pudjosewoyo, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1986
- Rony Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1981
- \_\_\_\_\_, Studi Hukum dan Masyarakat, Alumni, Bandung, 1985
- Siti Soetami, Hukum Administrasi Negara, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1993
- Soedarsono, Kuliah Hukum Kondominium, Fakultas Hukum Unika Atmajaya, Jakarta, 1987
- Soehino, Perkembangan Pemerintah di Daerah, Liberty, Yogyakarta, 1995
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Press, Jakarta, 1981
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah

Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman

Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1998 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun

Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 1993 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 1996 tentang Rumah Susun di Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang Nomor 648 / 385 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Dan Keringanan Pembayaran Uang Sewa Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah